

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2026**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAPAN
2025**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin

Tapan, Agustus 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

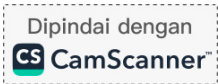


SYAMWIL, S.STP.MM

NIP.19820113 200112 1 003

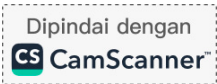
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	11
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.3.1	Permasalahan dan hambatan	21
2.3.2	Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi ..	24
2.3.3	Tantangan dan peluang.....	26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3	Program Dan Kegiatan.....	39
BAB IV	RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	48
BAB V	PENUTUP	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja dan Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2	Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	31
Tabel 2.4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026	41
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	46
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan Pemerintahan yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan.

Rencana kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

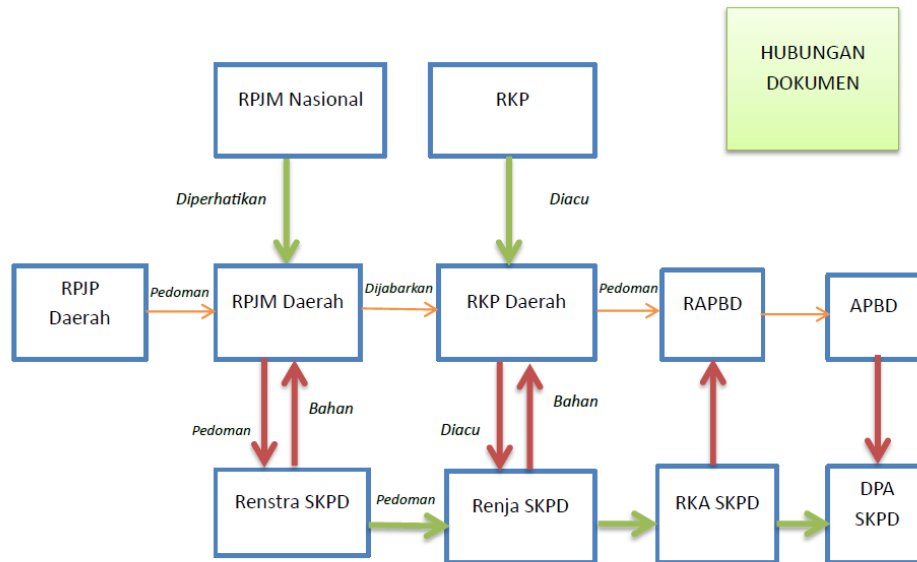
1. Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
3. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
4. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya
5. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:
 - a. Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
 - b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,
 - c. Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2026 pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1 : Tahapan Penyusunan Rencana Kerja



Rencana kerja kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergisitas dengan program dan kebijakan Pemerintahan Pusat. Sebagai pedoman rencana tahunan, Renja Kecamatan Basa Ampek Balai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
- 2) Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.
- 3) Kebijakan dari Pemerintah karena terjadinya pengurangan anggaran pada pergeseran anggaran Tahun 2025 karena efisiensi.
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah untuk memetakan kebutuhan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan selama 1(satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029, serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, proses penyusunan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan dokumen Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Inspektorat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.2 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II . Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3.3 Program dan kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 senilai Rp. 2.338.387.175,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri dari 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub. Kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 1.955.134.073,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara > 90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Beberapa indikator kinerja (berdasarkan Renstra) yang sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kinerja pelayanan, seperti : pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja

pelayanan di kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Nilai AKIP Pemerintahan Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik.
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (EPPGBM)
7. Persentase Konflik Yang Diselesaikan

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat 6 program kegiatan yang dengan status capaian "Sedang" (83,61%). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan
Capaian Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir
Selatan

KOD E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)					Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2024		Ting kat Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n) (2025) 11		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8= (7/6)	9		10= (5+7+9)		11= (10/4)
7.01	KECAMATAN													
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah												
7.01.0 1.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah												
7.01.0 1.2.01. 0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 dok	24 dok	6	dok	6	dok	100	6	dok	27	dok	75
7.01.0 1.2.01. 0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300 dok	212 dok	53	dok	53	dok	100	53	Dok	235	dok	74,33
7.01.0 1.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %											
7.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 org/bln	48 org/bln	12	48 org/bln	12	48 org/bln	100	12	48 org/bln	51	48 org/bln	70,83
7.01.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	72 dok	48 dok	12	dok	12	dok	100	12	dok	53	dok	69,44

(Rencana Kerja Kec. Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026)

Page 13

1.2.02.0002 -	Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN												
7.01.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.01.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket	24 paket	6	paket	6	paket	100	6	pkt	27	pkt	72,22
7.01.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	12 paket	12	paket	12	paket	100	6	pkt	16	pkt	38,89
7.01.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket											
7.01.01.2.06.0004 -	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	54	pkt	70,83
7.01.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	54	pkt	70,83
7.01.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 paket	48 paket	12	paket	12	Paket	100	12	paket	53	Pkt	66,67
7.01.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800 laporan	600 laporan	120	lporan	120	lap	100	120	lap	660	lap	35,00
7.01.01.2.07 -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 paket	3 paket	3	paket	3	paket	100	3	paket	3	pkt	10,71
7.01.01.2.07.0006 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 paket	7 pkt	-	-	-	-	-	-	-	7	pkt	23,33
7.01.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan												

1.2.08 -	Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	48 lap	12	lap	12	Lap	100	12	Lap	53	Lap	66,67
7.01.0 1.2.08. 0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	48 lap	12	lap	12	Lap	100	12	Lap	53	lap	70,83
7.01.0 1.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik												
7.01.0 1.2.09. 0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit	16 unit	4	unit	4	Unit	100	4	Unit	18	unit	70,83
7.01.0 1.2.09. 0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	36 unit	9	unit	9	unit	100	9	unit	39	unit	76,47
7.01.0 1.2.09 .0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8 unit	2	unit	2	unit	100	2	Unit	9	unit	75,00
7.01.0 1.2.09 .0010 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	3	5	unit	3	unit	100	5	unit	5	unit	6,67
7.01.0 2 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan												
7.01.0 2.2.04 -	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan												
7.01.0 2.2.04. 0002 -	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	640 lap	400 lap	100	lap	100	lap	100	100	lap	450	lap	64,06

7.01.0 2.2.04 -	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 lap	48 lap	12	lap	12	lap	100	12	lap	51	lap	70,83
7.01.0 3 -	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju												
7.01.0 3.2.01 -	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan												
7.01.0 3.2.01. 0001 -	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	180 usulan	140 usulan	30	lap	30-	lap	100	-	-	140	lap	77,78
7.01.0 3.2.01. 0003 -	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 lap	30 lap	10	lap	10	lap	100	10	lap	36	lap	60,00
7.01.0 4 -	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum												
7.01.0 4.2.01 -	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	24 lap	16 lap	4	lap	4	lap	100	4	lap	18	lap	75,00
7.01.0 4.2.01. 0001 -	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 lap	16 lap	4	lap	4	lap	100	4	lap	18	lap	75,00
7.01.0 5 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum												
7.01.0 5.2.01 -	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	600 org	400 org	100	org	100	org	100	100	org	500	org	84,00
7.01.0 5.2.01.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	600 org	400 org	100	org	100	org	100	100	org	500	org	84,00

0003 -		Bangsa												
7.01.0 6 -	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	60 nagari	40 Nagari	10	Nag	10	Nag	100	10	Nag	46	Nag	76,67
7.01.0 6.2.01 -	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)												
7.01.0 6.2.01. 0002 -	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 nagari	40 Nagari	10	Nag	10	Nag	100	10	Nag	46	Nag	76,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+n)	Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Lkj Kecamatan	-	-	BB	-	-	-	BB	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Jumlah Dokumen informasi public PPID Pembantu	-	-	230	-	-	-	239	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3	Jumlah Berita PPID pembantu			325	-	-	-	326	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
4	Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

5.	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	-	-	-	BB	BB	-	-	BB(74,21)	BB(75,00)	BB(75,00)	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	85	85	-	-	85,25	89	89	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
7.	Nilai Kematangan Inovasi	-	-	-	75	75	-	-	87	89	89	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
8.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	-	75 %	75 %	-	-	100 %	100	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
9.	Angka Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	0 %	0 %	-	-	0 %	0 %	0 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
10.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	-	-	-	-	1,74 %	-	-	2,92 %	2,5 %	2,5 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
11.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	-	-	-	-	80 %	-	-	100 %	100 %	100 %	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Capaian kinerja dari pelayanan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 dari 4 indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai AKIP Pemerintahan Daerah
Dari hasil penilaian inspektorat kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 mendapatkan nilai LKj BB (74,21) mempunyai akuntabilitas kinerja yang sangat baik.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dari hasil survey kepada masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 memperoleh nilai IKM 85,25 %.
- Nilai Kematangan Inovasi
Hasil dari penilaian Indeks Inovasi daerah oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Inovasi kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memperoleh nilai kematangan 87.
- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik.
Jumlah Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi dan laporan keuangan yang baik adalah 10 Nagari atau 100 %.
- Angka Kemiskinan Ekstrim.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Pesisir Selatan 0%.
- Prevalensi Stunting (EPPGBM).
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Prevalensi Stunting (EPPGBM) Tahun 2024 mencapai 2,92 %.
- Persentase Konflik Yang Diselesaikan.
Konflik yang diselesaikan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2024 mencapai 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan di Kecamatan Basa Ampek Balai tapan, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan tersebut antara lain : Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar

kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih relatif kurang representatif.
4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan

tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

5. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana serta kualitas personil yang tidak merata.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

3 Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta

tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan

ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka

secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

3.3.1 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

3.3.1.1. Tantangan

Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.

1. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
2. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
3. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan,

adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.

4. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
5. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
6. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
7. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
8. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

3.3.1.2 Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu :

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang

berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.

3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat

bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Proses usulan terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan isi isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah jika usulan yang diambil dari usulan musrenbang diusulkan dibuat hanya usulan prioritas saja. Untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

TABEL 2.3

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. BAB Tapan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	1.672.976.016,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. BAB Tapan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	1.672.976.016,-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		10,000,000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		10,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	5.000.000,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	6	5.000.000,	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	5.000.000,	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)	53	5.000.000,	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		1.337.976.016,	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		1.337.976.016,	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.274.526.016,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)	168	1.274.526.016,	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	63.450.000,	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. BAB Tapan	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	12	63.450.000,	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		198.000.000,	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		198.000.000,	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	6	3,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	6	5.000.000,	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	6	5.000.000,	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	3.000.000,	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec. BAB Tapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	3.000.000,	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan (paket)	12	25.000.000,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	25.000.000,	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	6.000.000,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	6.000.000,	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)	12	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)	12	3.000.000,	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	150.000.000,	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	3.000.000,	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. BAB Tapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	3.000.000,	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli		18.000.000,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. BAB Tapan	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang dibeli		18.000.000,	
	Pengadaan mebel	Kec. BAB Tapan	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	2	5.000.000,	Pengadaan mebel	Kec. BAB Tapan	Jumlah mebel yang dipelihara unit)	2	5.000.000,	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	6	5.000.000,	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	6	5.000.000,	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehababilitas i (unit)	1	8.000.000,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehababilitas i (unit)	1	8.000.000,	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan		56.500.000,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan		56.500.000,	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	8.500.000,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	8,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	48.000.000,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. BAB Tapan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	48.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		52.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		52.500.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	4	38.000.000,	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	5	5.000.000,	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)	5	5.000.000,	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	5.000.000,	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	5.000.000,	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	3.000.000,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	3.000.000,	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. BAB Tapan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	1.500.000	Kec. BAB Tapan	Kec. BAB Tapan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	1.500.000,	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BAB Tapan	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BAB Tapan	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	100	20.000.000,	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	100	20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	1	20.000.000,	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	1	20.000.000,	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		55.000.000	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju		55.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan		50.000.000,-					50.000.000	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	15.000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	15.000,000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	35.000,000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	35.000,000	
	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.000.000,-					5.000.000,-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	20	2.000.000,-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. BAB Tapan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	20	2.000.000,-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	20	3.000.000,-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Kec. BAB Tapan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	20	3.000.000,-	

			Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)			Ekonomi Lainnya		Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti		4.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti	12. 000 .00 0,-	12.000.000	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		4.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		12.000.000	
	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4	2.000.000	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Kec. BAB Tapan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)	4	8.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	2.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. BAB Tapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4.000.000	
5	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		70,000,000	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BAB Tapan	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		70,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. BAB Tapan	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		70,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kec. BAB Tapan	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		70,000,000	

	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	70,000,000	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Kec. BAB Tapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	100	70,000,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BAB Tapan	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100	40,000,000,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BAB Tapan	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik	100	40,000,000	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	12	40,000,000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. BAB Tapan	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100	40,000,000	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	12	40,000,000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Kec. BAB Tapan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)	100	40,000,000	
	JUMLAH				1.881.976.016,					1.881.976.016,	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2026

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Strategi yang merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan menumbuhkan hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Koordinasi lintas sektoral lebih ditingkatkan kembali untuk kelanjutan pembangunan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “ Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi”.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Meningkatnya efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan..

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualirtas dan bersinergi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai AKIP kecamatan	BB (72,00)
		Meningkatnya efektivitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	88
			Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	90
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang memiliki administrasi yang baik	100
			Angka Kemiskinan ekstrim	0 %
			Prevalensi stunting (EPPGBM)	2,5 %
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	100 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-

2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program : 6 (enam)

Jumlah Kegiatan : 10 (sepuluh)

Jumlah Sub Kegiatan: 29 (dua puluh sembilan)

Pagu Indikatif APBD: Rp. 1.842.976.016,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Semua Urusan

I. Semua Bidang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub.Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Administrasi umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Fasilitas kunjungan tamu.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan :
- Pengadaan mebel.
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub. Kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub. Kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

- Pemeliharaan rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Sub.kegiatan :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

1. Kegiatan : - Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

Sub kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sub, kegiatan :

- Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat.

5. Program koordinasi urusan pemerintahan umum

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah.

Sub.kegiatan :

- Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.

6. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa/Nagari.

Program, kegiatan dan sub.kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Uraian rumusan rencana program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:

TABEL 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2027	
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
1	2	3	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib											
	Kecamatan Basa Ampek Balai											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. BAB Tapan		- 2.165833 33,101.07 02778		1.560.776.016,-	Pendapatan Transfer			1.624.500.000,-
	Kegiatan :											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. BAB Tapan			59	10.000.000,			59	14,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. BAB Tapan			6	5.000.000,			6	7,000,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. BAB Tapan			53	5.000.000,			53	7,000,000

7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. BAB Tapan			180	1.337.976.016,			180	1.364.000.000,
7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		Kec. BAB Tapan			168	1.274.526.016,			168	1.300.000.000 ,
7.01.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. BAB Tapan			12	63.450.000,			12	64.000.000,
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. BAB Tapan				198.000.000,				212..000.000,
7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			6	3.000.000,			6	3.000.000,
7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			6	5.000.000,			6	5.000.000,
7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Kec. BAB Tapan			1	3.000.000,			1	3.000.000,

7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. BAB Tapan			12	25.000.000,			12	25.000.000,
7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			12	6.000.000,			12	8.000.000,
7.01.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kec. BAB Tapan			12	3.000.000,			12	4.000.000,
7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		Kec. BAB Tapan			12	150.000.000,			12	161.000.000,
7.01.0 1.2.06 .0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kec. BAB Tapan			12	3.000.000,			12	3.000.000,
7.01.0 1.2.06 .0009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.000.000				15.000.000,-
7.01.0 1.2.06 .07.00 05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kec. BAB Tapan			2	5.000.000,-			2	5.000.000,-

7.01.0 1.2.06 .07.00 06	Pengadaan peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang disediakan						5.000.000,-			2	5.000.000,-
7.01.0 1.2.06 .07.00 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Kec. BAB Tapan			1	8.000.000,-			1	5.000.000,-
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.500.000,-				56.500.000,-
7.01.0 1.2.08 .0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kec. BAB Tapan			12	8.500.000,-			12	8.500.000,-
7.01.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umumkantor yang disediakan		Kec. BAB Tapan			12	48.000.000,-			12	48.000.000,-
X.XX. 01.07. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Kec. BAB Tapan				52.500.000,-				74.500.000,-
7.01.0 1.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak		Kec. BAB Tapan			4	38.000.000,-			4	40.000.000,-

7.01.0 1.2.09 .0005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kec. BAB Tapan			3	5.000.000,			3	5.000.000,
7.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		Kec. BAB Tapan			5	5.000.000,			5	5.000.000,
7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		Kec. BAB Tapan			2	3.000.000,			2	20.000.000,
7.01.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)			Kec. BAB Tapan		5	1.500.000,			5	4.500.000,
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		Kec. BAB Tapan		- 2.165833 33,101.07 02778	62	40,000,000	Pendapatan Transfer		62	40.000.000,-
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. BAB Tapan				40,000,000			62	40,000,000
7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. BAB Tapan			100	20.000.000,			100	20.000.000,
7.01.0 2.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. BAB Tapan			1	20.000.000,			1	20.000.000,

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. BAB Tapan		- 2.1658333 3,101.070 2778	22	55,000,000	Pendapatan Transfer		22	55,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. BAB Tapan				55,000,000				55,000,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. BAB Tapan			10	15.000.000,			10	15.000.000,
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan			10	40.000.000,			10	40.000.000,
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		Kec., BAB Tapan								
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		Kec. BAB Tapan								

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. BAB Tapan		- 2.1658333 3,101.070 2778	7	2,000,000	Pendapatan Transfer		7	2,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. BAB Tapan				4,000,000			7	12,000,000
7.01.04.2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan			4	2.000.000,			4	8.000.000,
7.01.04.2.01	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kec. BAB Tapan			4	2.000.000,-			4	4.000.000,-
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. BAB Tapan		- 2.1658333 3,101.070 2778	100	70,000,000	Pendapatan Transfer		100	70,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. BAB Tapan				70,000,000				70,000,000

7.01.0 5.2.01 .03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. BAB Tapan			200	70.000.000,			200	70.000.000,
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. BAB Tapan		- 2.1658333 3,101.070 2778	100	40,000,000	Pendapatan Transfer		100	40,000,000
7.01.0 6.201	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. BAB Tapan				40,000,000			100	40,000,000
7.01.0 5.2.01 .02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. BAB Tapan			12	40.000.000,			12	40.000.000,
JUMLAH								1.881.976.018, "-,-"				1.953.000.000 ,"-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana Tabel. 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan penting
				Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	target capaian kinerja	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	3	4	8	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib									
	Kecamatan Basa Ampek Balai									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333 ,101.07027 78		1.560.776.016,-	Pendapata n Transfer	
	Kegiatan :									
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Peng- anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kec. BAB Tapan			59	10.000.000,		
7.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		Kec. BAB Tapan			6	5.000.000,		
7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah (laporan)		Kec. BAB Tapan			53	5.000.000,		
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat Daerah yang dibayarkan		Kec. BAB Tapan			180	1.337.976.016,		

7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		Kec. BAB Tapan			168	1.274.526.016,		
7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		Kec. BAB Tapan			12	63.450.000,		
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum perangkat daerah		Kec. BAB Tapan				198.000.000,		
7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			6	3.000.000,		
7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			6	5.000.000,		
7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Kec. BAB Tapan			1	3.000.000,		
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kec. BAB Tapan			12	25.000.000,		
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		Kec. BAB Tapan			12	6.000.000,		
7.01.01.2 .06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Kec. BAB Tapan			12	3.000.000,		
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		Kec. BAB Tapan			12	150.000.000,		
7.01.01.2 .06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kec. BAB Tapan			12	3.000.000,		

7.01.01.2 .06.0009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.000.000		
7.01.01.2 .06.07.00 05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kec. BAB Tapan			2	5.000.000,-		
7.01.01.2 .06.07.00 06	Pengadaan peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang disediakan						5.000.000,-		
7.01.01.2 .06.07.00 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Kec. BAB Tapan			1	8.000.000,-		
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.500.000,-		
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kec. BAB Tapan			12	8.500.000,-		
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umumkantor yang disediakan		Kec. BAB Tapan			12	48.000.000,-		
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Kec. BAB Tapan				52.500.000,-		
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak		Kec. BAB Tapan			4	38.000.000.-		

7.01.01.2 .09.0005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kec. BAB Tapan			3	5.000.000,		
7.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit)		Kec. BAB Tapan			5	5.000.000,		
7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		Kec. BAB Tapan			2	3.000.000,		
7.01.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)		Kec. BAB Tapan			5	1.500.000,		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333 ,101.07027 78	62	40,000,000	Pendapata n Transfer	
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kec. BAB Tapan				40,000,000		
7.01.02.2 .04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)		Kec. BAB Tapan			100	20.000.000,		
7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)		Kec. BAB Tapan			1	20.000.000,		

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333, 101.0702778	22	55,000,000	Pendapatan Transfer	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		Kec. BAB Tapan				55,000,000		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		Kec. BAB Tapan			10	15.000.000,		
7.01.02.2.04.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan			10	40.000.000,		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333, 101.0702778	7	2,000,000	Pendapatan Transfer	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. BAB Tapan				4,000,000		
7.01.04.2.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		Kec. BAB Tapan			4	2.000.000,		

7.01.04.2.01	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kec. BAB Tapan			4	2.000.000,-		
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan yang terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333, 101.0702778	100	70,000,000	Pendapatan Transfer	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		Kec. BAB Tapan				70,000,000		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		Kec. BAB Tapan			200	70.000.000,		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengeluaran keuangan dan administrasi yang baik		Kec. BAB Tapan		- 2.16583333, 101.0702778	100	40,000,000	Pendapatan Transfer	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Kec. BAB Tapan				40,000,000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Nagari (Laporan)		Kec. BAB Tapan			12	40.000.000,		
JUMLAH								1.881.976.018,-		

LAMPIRAN RENJA TAHUN 2026 APLIKASI SIPD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN						1.637.708.266,00							1.637.708.266,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.607.366.016,00							1.607.366.016,00	
	7.01	KECAMATAN						1.607.366.016,00							1.607.366.016,00	
1.	7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.571.366.016,00						-	1.571.366.016,00	
		[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah]	-	-	-	-	-	1.571.366.016,00	-	-	-	-	-	-	1.571.366.016,00	-
	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Mewu judka n Tata Kelola Pem erinta han Dan Pelaya nan Publi k Yang Bersi h, Akunt abel Serta Berku alitas	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah				10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pesis ir Selat an, Basa Amp ek Bala i Tapa n.	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Mewuj udka n Tata Kelola Pem erintah an Dan Pelaya nan Publik Yang	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

(Rencana Kerja Kec. Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026)

									Tanjung Pondok Tapan			Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas					
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.338.366.016,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-		1.338.366.016,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang/bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/bulan	1.274.526.016,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			1.274.526.016,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	63.840.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.840.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	128.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	128.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

7.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
7.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			-				-	2.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
7.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		120.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	56.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		48.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih , Akuntabel Serta Berkuualitas	-	-	42.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	38.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan , Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih , Akuntabel Serta Berkuualitas	-		38.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				4 Unit	1.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuualitas	-		1500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Jumlah Remaja Mesjid yang aktif persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah Persentase LDS yang aktif</i>	-			35 45 75	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
		[Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan]	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-

	7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.000.000,00			Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuj udka n Tata Kelola Pem erinta han Dan Pelaya nan Publik Yang Bersih , Akunt abel Serta Berku alitas	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 2.2.04. 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			0				100 0	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selata n, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuj udka n Tata Kelola Pem erinta han Dan Pelaya nan Publik Yang Bersih , Akunt abel Serta Berku alitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

		[Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah]	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
	7.01.0 2.2.04. 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintah an Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkual itas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
3.	7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	-			65	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		[Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju]	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
	7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkat an efektifitas kegiatan pemberda yaan masyarak at di wilayah kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	-			12 Laporan 10 Nagari	15.000.000,00			-	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintah an Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkual itas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 3.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			0				0 0	5.000.000,00	-	DAN A ALO KASI UMU M (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 3.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
4.	7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
		[Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum]	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
	7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	2.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 4.2.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

			0				4 0	2.000.000,00	-	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
		[Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum]	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

			-				-	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
		[Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar]	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X	NON URUSAN						30.342.250,00							30.342.250,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30.342.250,00							30.342.250,00	

1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.342.250,00						-	30.342.250,00	
		-	-	-	-	-	-	30.342.250,00	-	-	-	-	-	-	30.342.250,00	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	27.342.250,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	27.342.250,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.342.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA OKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		18.342.250,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA OKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	J U M L A H							1.637.708.266,00	1.637.708.266,00							

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2027, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2026

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN RENJA TAHUN 2026 APLIKASI SIPD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN						1.637.708.266,00							1.637.708.266,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.607.366.016,00							1.607.366.016,00	
	7.01	KECAMATAN						1.607.366.016,00							1.607.366.016,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.571.366.016,00						-	1.571.366.016,00	
		[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah]	-	-	-	-	-	1.571.366.016,00	-	-	-	-	-	-	1.571.366.016,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah</i>				50 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisi r Selat an, Basa Ampei k Balai Tapa n, Tanjung Pond ok Tapan	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.338.366.016,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.338.366.016,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				168 Orang/bulan	1.274.526.016,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.274.526.016,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	63.840.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.840.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	128.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuaitas	-	-	128.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuaitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			-				-	2.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		120.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	56.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		48.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih , Akuntabel Serta Berkuualitas	-	-	42.500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	38.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan , Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih , Akuntabel Serta Berkuualitas	-		38.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				4 Unit	1.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkuualitas	-		1500.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Jumlah Remaja Mesjid yang aktif persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah Persentase LDS yang aktif</i>	-			35 45 75	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
		[Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan]	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-

	7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.000.000,00			Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuj udka n Tata Kelola Pem erinta han Dan Pelaya nan Publik Yang Bersih , Akunt abel Serta Berku alitas	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 2.2.04. 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			0				100 0	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selata n, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjun g Pondok Tapan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuj udka n Tata Kelola Pem erinta han Dan Pelaya nan Publik Yang Bersih , Akunt abel Serta Berku alitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

		[Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah]	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
	7.01.0 2.2.04. 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memban gu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataa n ekonomi dan pembe rantasan kemiskin an.	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintah an Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkual itas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
3.	7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	-			65	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		[Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju]	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
	7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkat an efektifitas kegiatan pemberda yaan masyarak at di wilayah kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	-			12 Laporan 10 Nagari	15.000.000,00			-	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintah an Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkual itas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 3.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			0				0 0	5.000.000,00	-	DAN A ALO KASI UMU M (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 3.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
4.	7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
		[Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum]	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
	7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	2.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.0 4.2.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

			0				4 0	2.000.000,00	-	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
		[Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum]	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

			-				-	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
		[Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar]	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DA NA AL OK ASI UM UM (DA U)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X	NON URUSAN						30.342.250,00							30.342.250,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30.342.250,00							30.342.250,00	

1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.342.250,00						-	30.342.250,00	
		-	-	-	-	-	-	30.342.250,00	-	-	-	-	-	-	30.342.250,00	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	27.342.250,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	27.342.250,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.342.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA OKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		18.342.250,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA OKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Basa Ampek Balai Tapan, Tanjung Pondok Tapan	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	J U M L A H							1.637.708.266,00	1.637.708.266,00							